



# KONSOLIDASI DEMOKRASI

Andi Widjajanto

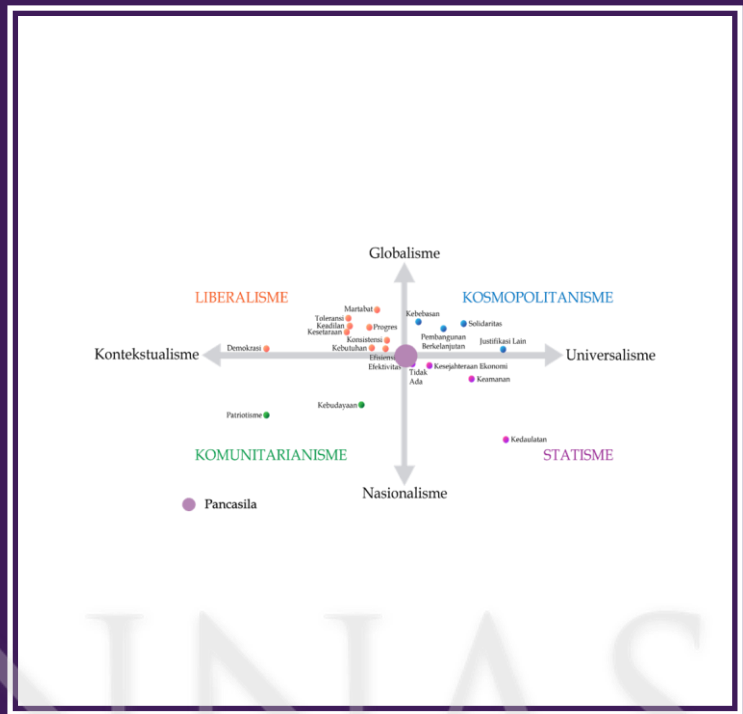
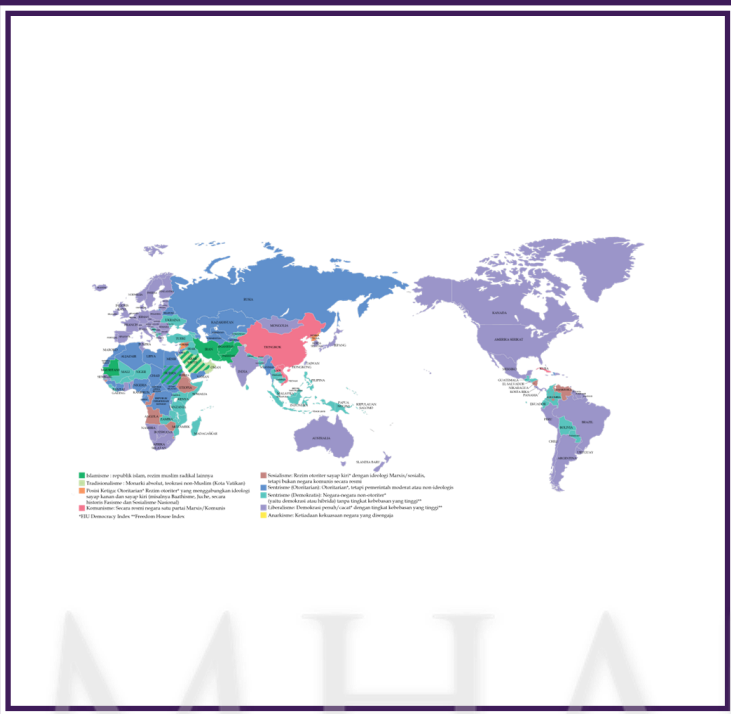
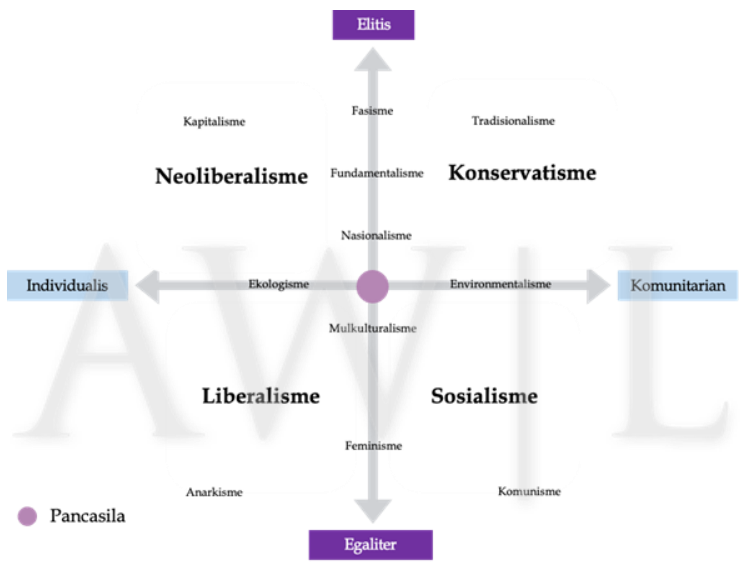




## Evolusi Konseptual Geopolitik



Gagasan **Geopolitik** terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan konteks historis. Meskipun demikian, terdapat empat karakter umum geopolitik: 1) Studi geopolitik cenderung menawarkan strategi **ekspansionis**; 2) Strategi ekspansionis diarahkan untuk **menguasai sumber daya** di ranah geografi tertentu; 3) Strategi ekspansionis mengarah kepada ambisi menjadi **negara** hegemoni; 4) Strategi ekspansionis cenderung diwarnai dengan pertarungan kekuatan yang bisa bereskalasi menjadi **perang terbuka antar negara**.



# Ideologi Politik Global

# Rivalitas Geo V

## Konflik Rusia-Ukraina

### Instabilitas Harga Energi



### Instabilitas Harga Pangan



### Kondisi Konflik Terkini (Juli 2022)



Konflik Rusia-Ukraina membawa dampak berskala global. Secara ekonomi, sektor **pangan** dan **energi** menerima dampak terbesar. Rusia dan Ukraina merupakan negara produsen gandum besar dunia. Konflik secara langsung menghambat rantai pasok yang berpotensi menciptakan **krisis pangan**. Selain itu, Rusia merupakan salah satu produsen energi terbesar. Sikap antipati Barat terhadap Rusia menciptakan preseden negatif di pasar energi yang secara langsung berdampak pada **instabilitas harga**.

Sumber: US Energy Information Administration dan Eurostat; UNCTAD merujuk pada UN Comtrade Database 2020 dan Thomson Reuters (Bloomberg Commodity Index)

## Persaingan Pengaruh Amerika Serikat-Tiongkok

### Belt and Road Initiative (Tiongkok)



### Indo-Pacific Economic Framework (AS)

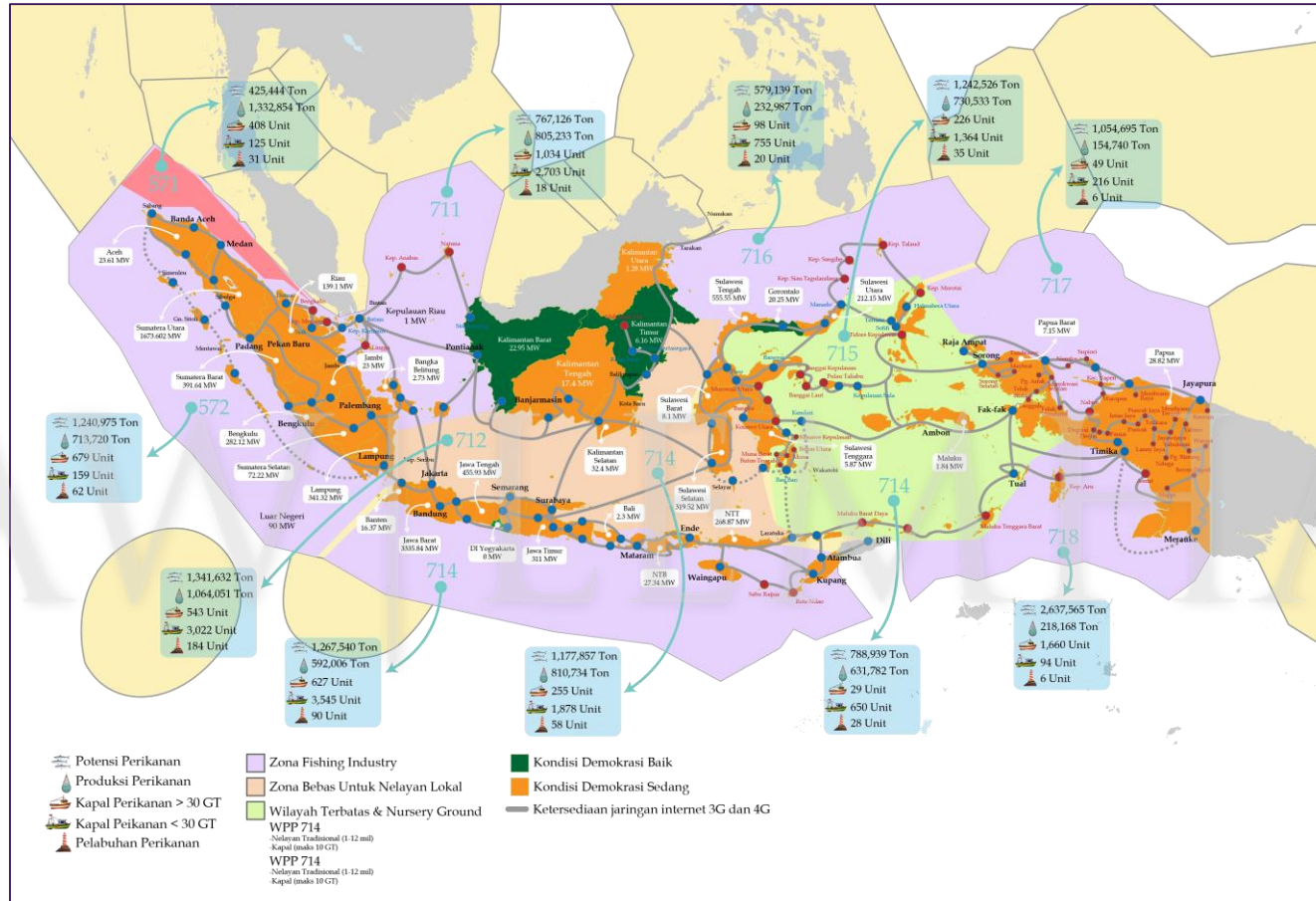


Tren kebangkitan Tiongkok menyebabkan persaingan pengaruh antara **Amerika Serikat** dan **Tiongkok**. Persaingan tersebut tercermin dari visi **pembangunan arsitektur kawasan**. Tiongkok menginisiasi **Belt and Road Initiative (BRI)** yang mengedepankan strategi pendekatan bilateral melalui pendanaan infrastruktur untuk memperkuat pengaruhnya pada negara mitra, terutama di Asia Pasifik. Sementara itu, AS menginisiasi **Indo-Pacific Economic Frameworks** yang memiliki ambisi lebih luas. Selain membangun infrastruktur melalui pilar Ekonomi Tangguh, AS juga berupaya melakukan reformasi struktural di negara-negara Asia Pasifik.

# Geo V di Indonesia



2020



Konsolidasi  
Demokrasi

Ekonomi Hijau

Ekonomi Biru

Transformasi  
Digital

Pembangunan Ibu  
Kota Nusantara

# Peta Jalan Demokrasi



INISIASI DEMOKRASI

1999



KONSOLIDASI DEMORASI

2014

IV-V-VI



DEMOKRASI MATANG

2029

VII



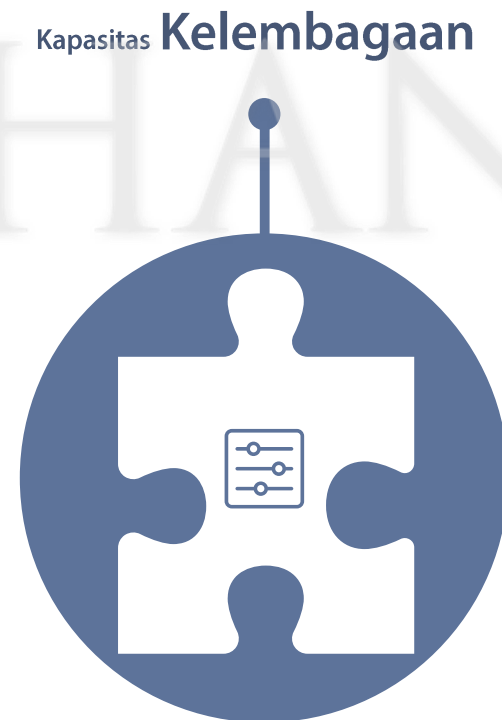
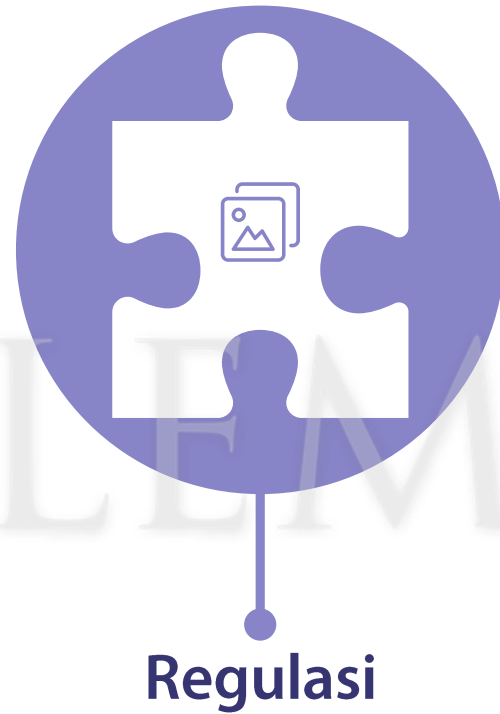
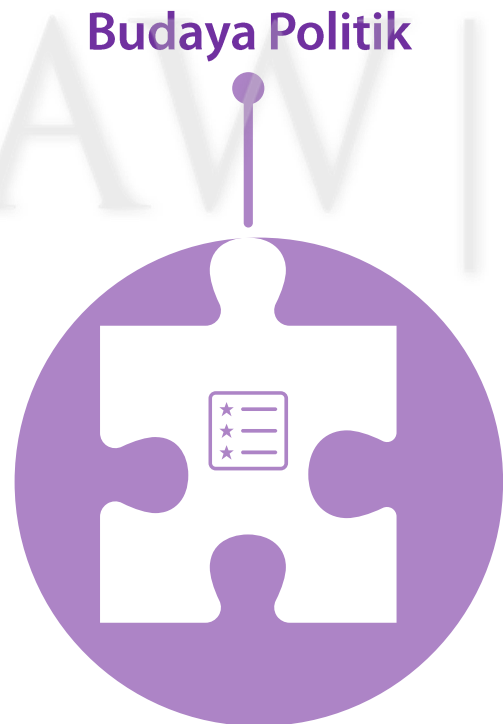
INSTALASI DEMOKRASI

2004

II-III

7 PEMILU DEMOKRATIS

# Tantangan Demokrasi



# Analisis Indeks Demokrasi

---





ECONOMIST  
INTELLIGENCE

EIU

Democracy Indeks disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Tujuannya adalah mengukur kondisi demokrasi di 165 negara dan 2 wilayah berdasarkan 5 variabel dan 60 indikator.

## Cakupan Indeks

Cakupan	Detail
Unit Analisis	165 Negara dan 2 Wilayah (2021).
Periode Publikasi	Edisi terakhir 2021. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2006.
Metode	EIU memberikan peringkat: skor dan status.  Penghitungan skor dalam skala 1 - 10. Kombinasi skor atas 5 variabel dan 60 indikator menentukan 4 status: "Demokrasi Penuh" ( <i>Full Democracy</i> ) skor > 8 "Demokrasi Terbatas" ( <i>Flawed Democracy</i> ) skor > 6, dan ≤ 8 "Rezim Hibrid" ( <i>Hybrid Regime</i> ) skor > 4, dan ≤ 6 "Rezim Otoritarian" ( <i>Authoritarian Regime</i> ) skor ≤ 4

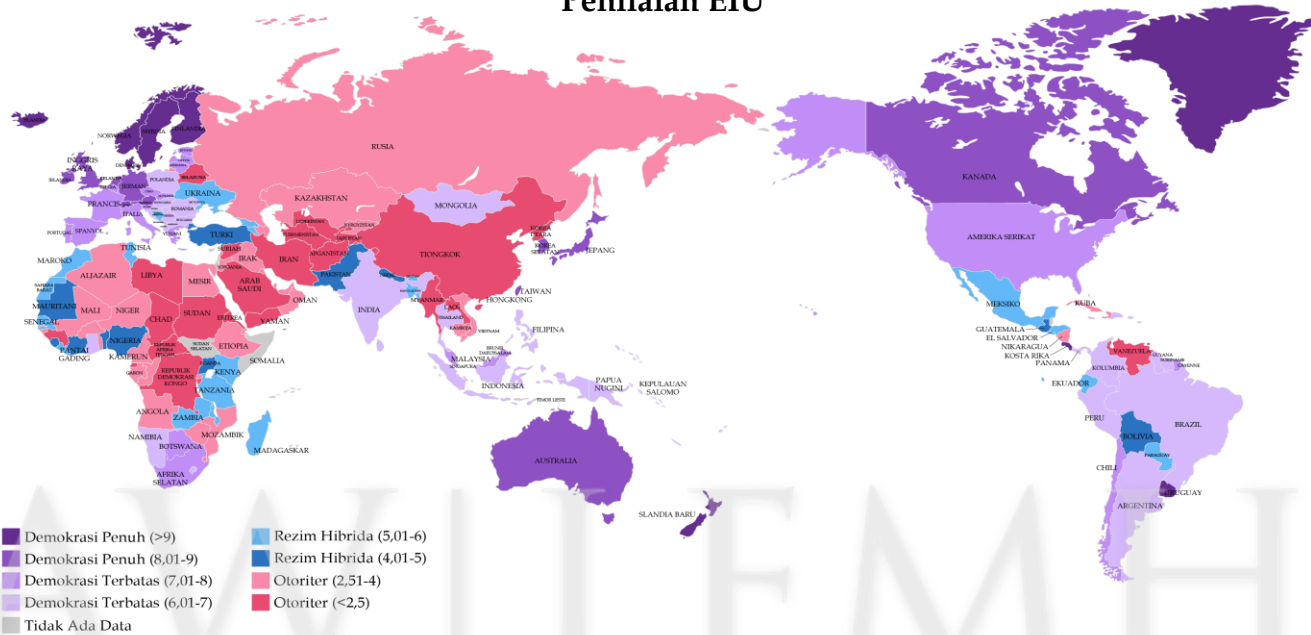
## Anatomi Indeks

Variabel	Indikator
1. Proses Pemilu dan Pluralisme	Pemilu jujur; kesetaraan hak politik; kesetaraan kesempatan kampanye; transparansi keuangan parpol; mekanisme peralihan jabatan; kebebasan membentuk parpol; kesetaraan kesempatan menempati jabatan pemerintahan.
2. Fungsi Pemerintah	Pembagian kekuasaan lembaga pemerintah; sistem " <i>check and balances</i> "; pemerintah bebas dari pengaruh militer; pengaruh asing terhadap kebijakan; akuntabilitas dan transparansi pemerintah; korupsi; kapabilitas dan kinerja PNS; kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Partisipasi Politik	Partisipasi pemilu; hak politik kelompok minoritas; perempuan di parlemen; keanggotaan parpol dan LSM; demonstrasi; partisipasi warga dewasa dalam politik.
4. Budaya Politik	Konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat; persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum, dan kesejahteraan; dukungan publik terhadap demokrasi; pemisahan antara negara dan agama.
5. Kebebasan Sipil	Kebebasan media elektronik dan cetak; kebebasan berekspresi; batasan akses internet; kebebasan berorganisasi; penggunaan kekerasan oleh pemerintah; peradilan yang independen; kebebasan beragama; toleransi beragama; kesetaraan di mata hukum; hak milik pribadi; perlindungan HAM; diskriminasi berdasarkan SARA.

# Posisi Indonesia menurut EIU

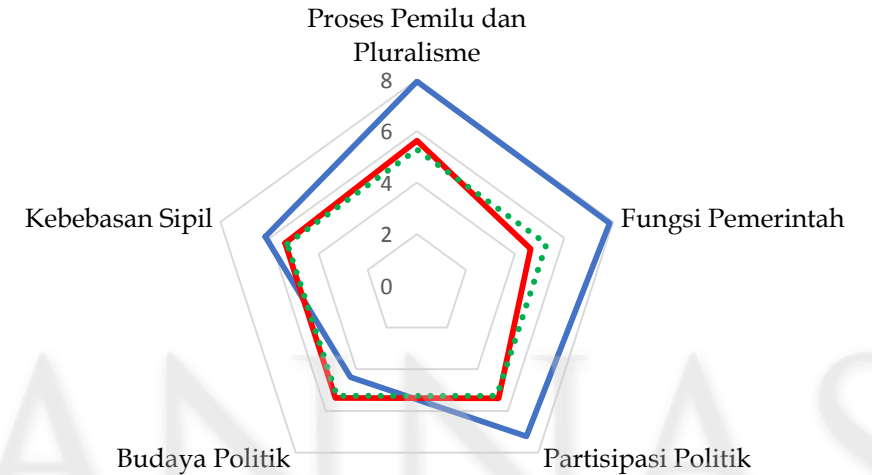


## Penilaian EIU



## Posisi Relatif Indonesia

— Indonesia — Rerata Dunia ..... Am



Variabel	Indonesia	Rerata Global
----------	-----------	---------------

- Proses Pemilu dan Pluralisme: 7,92 / 5,63
- Fungsi Pemerintah: 7,86 / 4,64
- Partisipasi Politik: 7,22 / 5,39
- Kebebasan Sipil: 6,18 / 5,37
- Budaya Politik: 4,38 / 5,38

— > Rerata Global — < Rerata Global

Menurut pengukuran EIU, Indonesia berada di kategori “*Flawed Democracy*” atau “Demokrasi Terbatas”, dengan skor total 6,71 dan menempati urutan ke-52 di dunia, dari total 165 negara dan 2 teritori.

Posisi ini terbilang baik, mengingat skor Indonesia di empat dari lima variabel dalam indeks ini berada di atas rerata global, yakni Proses Pemilu dan Pluralisme (7,92/5,63); Fungsi Pemerintah (7,86/4,64); Partisipasi Politik (7,22/5,39); dan Kebebasan Sipil (6,18/5,37). Posisi paling lemah Indonesia berada di variabel Budaya Politik (4,38/5,38).

Variabel Budaya Politik dengan skor rendah ini mencakup konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat; persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum, dan kesejahteraan; dukungan publik terhadap demokrasi; serta pemisahan antara negara dan agama.

\*EIU tidak menyediakan skor per indikator



Freedom in The World Index disusun on Freedom House dengan tujuan untuk mengukur tingkat hak politik dan kebebasan sipil yang dinikmati oleh individu di 195 negara dan 15 wilayah berdasarkan 2 variabel dan 25 indikator.

## Cakupan Indeks

Cakupan	Detail
Unit Analisis	195 Negara dan 15 Wilayah (2021)
Periode Publikasi	Edisi terakhir 2022 (Data 1 Januari – 31 Desember 2021). Pertama kali diluncurkan pada tahun 1972.
Metode	<p>Freedom House menerapkan penilaian skor &amp; status, yang dinilai oleh tim analis internal dan eksternal serta penasihat ahli dari komunitas akademisi, <i>think tank</i>, &amp; HAM.</p> <p>Skor: Negara/teritori diberi skor 0-4 untuk masing-masing indikator. Skor tertinggi hak politik = 40 (skor 4 untuk masing-masing 10 pertanyaan), skor tertinggi kebebasan sipil = 60 (skor 4 untuk masing-masing 15 pertanyaan).</p> <p>Status: Kombinasi skor 2 variabel dan 25 indikator menentukan 3 status: <b>“Bebas” (Free)</b>, <b>“Semi Bebas” (Partly Free)</b>, atau <b>“Tidak Bebas” (Not Free)</b>.</p>

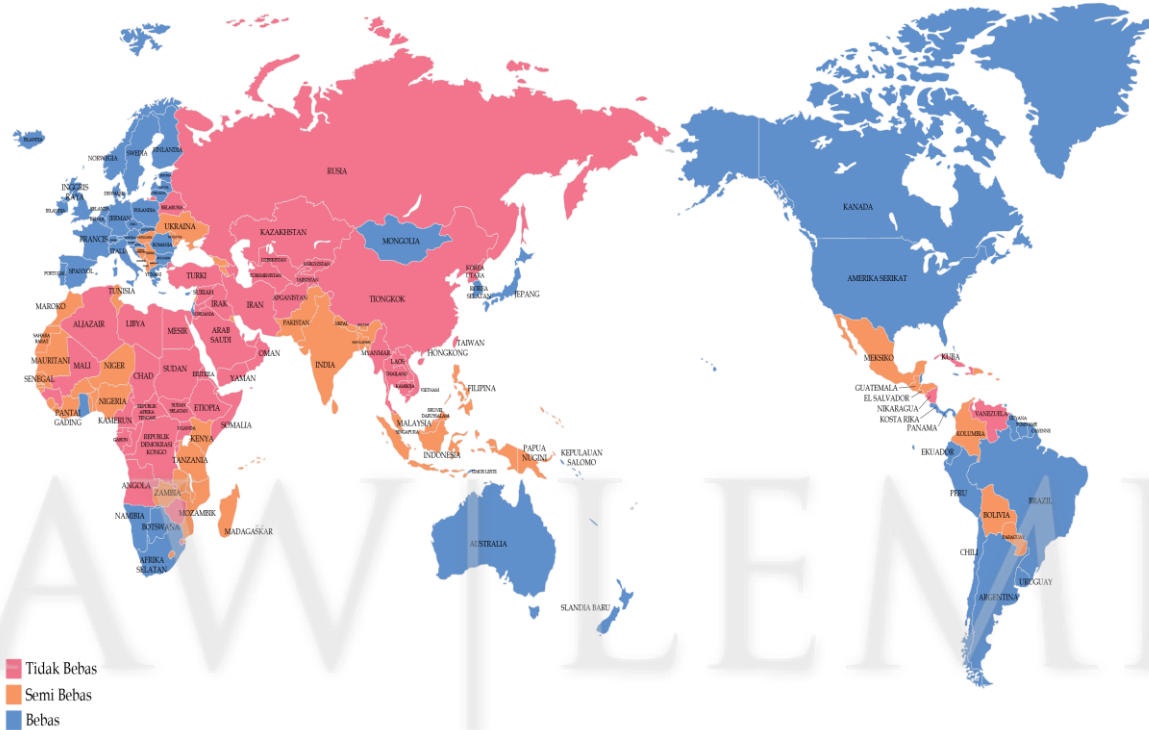
## Anatomi Indeks

Variabel/Sub-Variabel	Indikator
<b>1. Hak Politik</b>	
Proses Pemilu	Kejujuran dalam pemilu; kebebasan pemilihan legislatif; penyelenggaraan UU pemilu.
Pluralisme dan partisipasi politik	Hak berorganisasi dalam partai politik; peluang oposisi dalam pemilu; kebebasan pilihan politik masyarakat; kebebasan hak politik kelompok tertentu (SARA) dalam pemilu.
Fungsi Pemerintah	Kepala pemerintahan dan perwakilan legislatif nasional yang dipilih secara bebas menentukan kebijakan pemerintah; perlindungan terhadap korupsi; transparansi pemerintah.
<b>2. Kebebasan Sipil</b>	
Kebebasan berekspresi dan berkeyakinan	Kebebasan dan independensi pers; ekspresi keyakinan di depan publik; kebebasan akademik; kebebasan berekspresi pandangan politik.
Hak berasosiasi dan berorganisasi	Kebebasan berkumpul; kebebasan NGO terlibat dalam isu HAM; kebebasan berserikat.
Aturan hukum	Independensi peradilan; proses hukum pidana dan perdata; perlindungan dari perang; kesetaraan hukum.
Otonomi personal dan hak individu	Kebebasan bergerak; hak kepemilikan; perlindungan dan kebebasan sosial; kesetaraan kesempatan dan kebebasan dari eksploitasi ekonomi.

# Posisi Indonesia menurut Freedom House



## Penilaian FIW



## Posisi Relatif Indonesia



Berdasarkan hasil pengukuran FIW, Indonesia masuk ke dalam kategori “Partly Free” atau “Semi Bebas”, dengan skor total 59/100. Hanya ada tiga negara di dunia yang mendapat nilai maksimal 100, yakni Finlandia, Norwegia, dan Swedia.

Dalam empat sub-variabel, yakni proses pemilu; pluralisme dan partisipasi politik; fungsi pemerintah; serta otonomi personal dan hak individu, Indonesia mendapat skor baik dan berada di atas rerata global. Indonesia mendapat nilai sangat baik pada beberapa indikator, seperti pelaksanaan pemilu yang jujur dan bebas, hak berorganisasi dalam partai politik, dan peluang oposisi dalam pemilu. Akan tetapi, Indonesia mendapat skor kurang baik pada indikator pencegahan korupsi, transparansi pemerintah, dan hak politik kelompok minoritas.

Dalam tiga sub-variabel, yakni kebebasan berekspresi dan berkeyakinan; hak berasosiasi dan berorganisasi; serta aturan hukum, Indonesia mendapat skor yang buruk dan berada di bawah rerata global, yakni pada indikator terkait kesetaraan dalam hukum, penegakan hukum, independensi peradilan, serta kebebasan berekspresi dan berkeyakinan di depan publik.

# Posisi Indonesia menurut Freedom House



## Penilaian Freedom House

Variabel/Sub-Variabel	Indonesia	Rerata Global
<b>1. Hak Politik</b>	<b>30</b>	<b>21,88</b>
<b>a. Proses Pemilu</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
Kejujuran dalam Pemilu	4	
Kebebasan Pemilihan Legislatif	4	
Penyelenggaraan UU Pemilu	3	
<b>b. Pluralisme dan Partisipasi Politik</b>	<b>13</b>	<b>9,29</b>
Hak Berorganisasi dalam Partai Politik	4	
Peluang Oposisi dalam Pemilu	4	
Kebebasan pilihan politik masyarakat	3	
Kebebasan Hak Politik Kelompok Tertentu (SARA) dalam Pemilu	2	
<b>c. Fungsi Pemerintah</b>	<b>6</b>	<b>5,79</b>
Kebebasan Pemenang Pemilu menentukan kebijakan pemerintah	3	
Pencegahan Korupsi	1	
Transparansi Pemerintah	2	

— > Rerata Global

— < Rerata Global

Variabel	Indonesia	Rerata Global
<b>2. Kebebasan Sipil</b>	<b>29</b>	<b>33,83</b>
<b>a. Kebebasan Berekspresi dan Berkeyakinan</b>	<b>9</b>	<b>10,1</b>
Kebebasan dan Independensi Pers	3	
Kebebasan berekspresi & berkeyakinan di Publik	1	
Kebebasan Akademik	2	
Kebebasan Berekspresi Pandangan Politik	3	
<b>b. Hak Berasosiasi dan Berorganisasi</b>	<b>6</b>	<b>7,01</b>
Kebebasan Berkumpul	2	
Kebebasan NGO terlibat dalam Isu HAM	2	
Kebebasan Berserikat	2	
<b>c. Aturan Hukum</b>	<b>5</b>	<b>7,58</b>
Independensi Peradilan	2	
Proses Hukum Pidana dan Perdata	1	
Perlindungan dari Perang	1	
Kesetaraan Hukum	1	
<b>d. Otonomi Personal dan Hak Individu</b>	<b>9</b>	<b>9,14</b>
Kebebasan Bergerak	3	
Perlindungan dan Kebebasan Sosial	2	
Hak Kepemilikan	2	
Kesetaraan kesempatan dan kebebasan dari eksploitasi ekonomi	2	

# Tilik Indeks: Capaian Indonesia



Indeks	Variabel/Sub-Variabel	Skor Indonesia terhadap Rerata Global	Posisi Indonesia	Indikator
EIU Democracy Index	Fungsi Pemerintah	7,86/4,64	Sangat Baik	Pembagian kekuasaan lembaga pemerintah; sistem "check and balances"; pemerintah bebas dari pengaruh militer; pengaruh asing terhadap kebijakan; akuntabilitas dan transparansi pemerintah; korupsi; kapabilitas dan kinerja PNS; kepercayaan publik terhadap pemerintah.
	Partisipasi Politik	7,22/5,39	Sangat Baik	Partisipasi pemilu; hak politik kelompok minoritas; perempuan di parlemen; keanggotaan parpol dan LSM; demonstrasi; partisipasi warga dewasa dalam politik.
	Proses Pemilu dan Pluralisme	7,92/5,63	Baik	Pemilu jurdil; kesetaraan hak politik; kesetaraan kesempatan kampanye; transparansi keuangan parpol; mekanisme peralihan jabatan; kebebasan membentuk parpol; kesetaraan kesempatan menempati jabatan pemerintahan.
	Kebebasan Sipil	6,18/5,37	Baik	Kebebasan media elektronik dan cetak; kebebasan berekspresi; batasan akses internet; kebebasan berorganisasi; penggunaan kekerasan oleh pemerintah; peradilan yang independen; kebebasan beragama; toleransi beragama; kesetaraan di mata hukum; hak milik pribadi; perlindungan HAM; diskriminasi berdasarkan SARA.
Freedom in the World	Proses pemilu	11/7	Baik	Kejujuran dalam pemilu; kebebasan pemilihan legislatif; penyelenggaraan UU pemilu.
	Pluralisme dan partisipasi politik	13/9,29	Baik	Hak berorganisasi dalam partai politik; peluang oposisi dalam pemilu; kebebasan pilihan politik masyarakat; kebebasan hak politik kelompok tertentu (SARA) dalam pemilu.
	Fungsi pemerintah	6/5,79	Baik	Kepala pemerintahan dan perwakilan legislatif nasional yang dipilih secara bebas menentukan kebijakan pemerintah; perlindungan terhadap korupsi; transparansi pemerintah.
	Otonomi personal dan hak individu	9/9,14	Baik	Kebebasan bergerak; hak kepemilikan; perlindungan dan kebebasan sosial; kesetaraan kesempatan dan kebebasan dari eksploitasi ekonomi.

# Tilik Indeks: Capaian Indonesia



Indeks	Variabel/Sub-Variabel	Skor Indonesia terhadap Rerata Global	Posisi Indonesia	Indikator
Freedom in the World	Kebebasan berekspresi dan berkeyakinan	9/10,1	Buruk	Kebebasan dan independensi pers; ekspresi keyakinan di depan publik; kebebasan akademik; kebebasan berekspresi pandangan politik.
	Hak berasosiasi dan berorganisasi	6/7,01	Buruk	Kebebasan berkumpul; kebebasan NGO terlibat dalam isu HAM; kebebasan berserikat.
	Aturan hukum	5/7,58	Buruk	Independensi peradilan; proses hukum pidana dan perdata; perlindungan dari perang; kesetaraan hukum.
EIU Democracy Index	Budaya Politik	4,38/5,38	Buruk	Konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat; persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum, dan kesejahteraan; dukungan publik terhadap demokrasi; pemisahan antara negara dan agama.

Dari total 12 variabel dan sub-variabel yang dianalisis dari 2 indeks utama, Indonesia memiliki capaian: **2** berpredikat **sangat baik**; **6** berpredikat **baik**; dan **4** berpredikat **buruk**. Dominasi predikat baik menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia tergolong baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

# Kerangka Kerja Konsolidasi Demokrasi



## Komunikasi Politik

Kebebasan Berpendapat  
Akses Media  
Spektrum Ideologi  
Subtansi Program Aksi

## Kapasitas Kelembagaan

Partai Politik  
KPU  
Mahkamah Konstitusi  
Masyarakat Sipil  
Media  
Adopsi Teknologi

## Adopsi Teknologi

Identitas Digital  
National Cloud  
E-Voting  
Digitalisasi Demokrasi



## Budaya Politik

Pemilu Bebas  
Ruang Partisipasi Publik  
Demokrasi Substantif  
Kebebasan Sipil  
Kesetaraan

## Regulasi

Kebebasan Organisasi  
Kesetaraan  
Pendanaan Politik  
Penyelenggaraan Pemilu  
Sengketa Pemilu



# Lompatan Geo V di Indonesia



Konsolidasi Demokrasi

Ekonomi Hijau

Ekonomi Biru

Transformasi Digital

Pembangunan Ibu Kota Nusantara

2020

Visi Geo V 2045

